



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
19 – 21 NOVEMBER 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2020



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN
PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021
Tanggal 19 – 21 November 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertip mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI juga dijadikan dasar mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 – 2021.

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang beroperasi di provinsi Sumatera Selatan.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, Persaingan Usaha dan Standarisasi Nasional .

Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk terkait peran masing masing perseroan dalam melaksanakan operasionalnya dan kontribusi yang nyata bagi perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya, yang berdampak pada perekonomian Nasional.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk,
2. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. :

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP. F. PKB
2	A-103	MOHAMAD HEKAL, MBA	PIMP. F.GERINDRA

3	A-229	ST. ANANTA WAHANA, SH, MH	F.PDIP
4	A-179	GILANG DHIELAFALAREZ, SH, LL.M	F.PDIP
5	A-232	NYOMAN PARTA, SH	F.PDIP
6	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F.PDIP
7	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO S.KH, MM	F.PG
8	A274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
9	A-65	ANDRE ROSADE	F.GERINDRA
10	A-94	MUHAMMAD HUSEN FADLULLOH, B.BUS, MM, MBA	F.GERINDRA
11	A-374	H. SUBARDI, SH.MH	F. NASDEM
12	A-21	Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos, MS.i	F.PKB
13	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
14	A-542	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si	F. PD
15	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
16	A-409	RAFLI	F.PKS
17	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F.PKS
18	A-498	PRIMUS YUSTISIO, SE	F.PAN
19	A-472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos, M.Si	F.PPP

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan adalah sebagai berikut :

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan targetkan penyelesaian secara keseluruhan pada bulan oktober tahun 2022 mendatang. Dengan dibangunnya Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung, diharapkan dapat mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pandemi COVID19 yang nantinya akan terhubung dengan sektor logistik, memangkas waktu perjalanan, serta mendukung kelancaran *aksesibilitas* barang dan jasa di wilayah tersebut.

Jalan Tol Kayuagung Palembang Betung, kepemilikan saham sebesar 98,1836% panjang ruas 112 km dengan nilai investasi 22,16 triliun. Nilai investasi ruas tol Kayuagung—Palembang—Betung Seksi 1 (Kayuagung—Jakabaring) sebesar 10,36 triliun dan mulai bulan November 2020 telah dikenakan tarif tol yang sebelumnya semenjak dioperasikan jalan tol ruas ini yaitu pada bulan April 2020 tidak dikenakan biaya. Seksi 1B (Jakabaring—Keramasan) sepanjang 9 km ditargetkan akan beroperasi pada bulan januari 2021 begitu juga seksi 2B dan 3 (Palembang-Betung) sepanjang 69,19 Km ditargetkan dapat beroperasi pada bulan Oktober 2022.

Struktur tanah/lahan Jalan Tol Kayuagung Palembang Betung khususnya tahap I ini berupa rawa rawa menjadikan terjadinya perubahan nilai investasi yang semula 12 Triliun menjadi 22 Triliun, akibat hal tersebut beban keuangan perseroan bertambah. Tahap 1 Tol Kayuagung Palembang Betung dengan panjang ruas 42,5 km telah menelan biaya 14,4 triliun yang dibiayai oleh PT Wakita Karya (Persero) Tbk sendiri yang bersumber dari pinjaman komersial

dikarenakan belum ada lembaga atau perbankan yang mau mendanai proyek tersebut. Kemudian tahap 2 (dua) dengan panjang ruas jalan 69,19 km dengan nilai investasi sebesar 7,6 triliun, PT Wakita Karya (Persero) Tbk juga berharap ada lembaga atau perbankan yang mendanai untuk menyelesaikan proyek ini.

Saat ini pembangunan tahap 2 sudah mulai berlangsung hanya saja PT Wakita Karya (Persero) Tbk memerlukan support dari lembaga ataupun perbankan dikarenakan kondisi keuangan dari perseroan sedang mengalami kesulitan. tahap 2 ini terdiri dari seksi 2A dengan panjang ruas jalan tol 9,70 km, 2B dengan panjang ruas jalan tol 15,20 km, 3A dengan panjang ruas jalan tol 7,60 km dan 3B dengan panjang ruas jalan tol 15,69 km. untuk pembebasan lahan sudah mencapai 85%.

Rekomendasi :

- a) Komisi VI DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Kayuagung Palembang Betung khususnya tahap I.
- b) Komisi VI DPR RI memahami kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehingga apabila menginginkan untuk mengajukan PMN maka komisi VI DPR RI akan mendukung dengan syarat harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- c) Komisi VI DPR RI mendorong PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan efisiensi, pengaturan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan sinergitas dengan BUMN - BUMN Karya yang lainnya dengan mempertimbangkan batas kemampuan korporasi dan nilai-nilai ekonomis.

2. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

pandemi covid 19 ini juga berdampak pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk hal ini bisa dilihat dari kondisi keuangan perseroan. Pendapatan dan pertumbuhan keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk mengalami penurunan pada tahun 2019 16.254 miliar turun menjadi 12.849 miliar pada tahun 2020, meskipun begitu pada triwulan ke 3 (tiga) masih bisa memberi keuntungan bersih sebesar 1,7 triliun, hal itu karena efisiensi yang dilakukan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Menurunnya kondisi keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan dampak dari menurunnya penjualan batu bara disaat pandemi covid 19 seperti ini. Penjualan batu bara pada tahun 2019 sebesar 20,6 juta ton sekarang pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18,6 juta ton hal tersebut menjadikan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menyesuaikan angka produksi yang semula pada tahun 2019 sebesar 21,6 juta ton sekarang turun menjadi 19,4 juta ton sedangkan daya angkut dari 17,8 juta ton menjadi 17,7 juta ton. kalau dilihat dari sisi penjualan masih mayoritas pada pasar domestik yaitu sebesar 57% sebagai kewajiban PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk memenuhi *Domestic Market Obligation* atau disingkat DMO ke beberapa perusahaan BUMN.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga melakukan beberapa pengembangan Proyekstrategis sebagai antisipasi kedepan dengan Meningkatkan infrastruktur untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan nilai investasi sebesar 1,9 Triliun, serta Melakukan gasifikasi untuk mengolah batu bara menjadi DME (dymethyl eter) dengan nilai investasi sebesar 2 miliar dolar.

Rekomendasi :

- a) Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja PT Bukit Asam (Persero) Tbk terkait langkah langkah yang dilakukan selama pandemi covid 19.
- b) Komisi VI DPR RI mendorong PT Bukit Asam (Persero) Tbk agar lebih dapat memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga kinerja perseroan bisa ditingkatkan lebih maksimal.

Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI dalam rangka mengawasi kinerja BUMN serta rekomendasi bagi pemerintah, terkait dengan pengawasan program dan kebijakan pemerintah.

KETUA TIM
KUNKER KOMISI VI DPR RI
TTD

FAISOL RIZA, SS
A-33

G. Dokumentasi.

